

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM UPAYA PENANGGULANGAN
PREVALENSI ANGKA *STUNTING* DI DESA METARAMAN KECAMATAN
MARGOREJO KABUPATEN PATI**

Silvy Annada Wahyudhi, Herbasuki Nurcahyanto
Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. dr. Antonius Suroyo, Tembalang, Kota Semarang Kode Pos 50275
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman: <https://fisip.undip.ac.id> E-mail: fisip@undip.ac.id

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis proses kolaborasi dalam penanggulangan prevalensi angka *stunting* di Desa Metaraman Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati. Penelitian ini menggunakan teori *Collaborative Governance* yang dikemukakan oleh Ansell and Gash. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik triangulasi untuk memastikan kualitas data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada rapat koordinasi rutin dan penggunaan platform digital, beberapa OPD belum berperan maksimal. Kepercayaan dibangun melalui rapat, namun komitmen pimpinan masih kurang, dukungan masyarakat rendah, dan pihak non-OPD mengeluhkan kurangnya tindak lanjut dana. Pelaksanaan 8 aksi konvergensi oleh Bapperida Pati dimulai dengan analisis situasi, perencanaan, dan rebug *stunting*, serta penerbitan Peraturan Bupati sebagai landasan hukum. Koordinasi antar stakeholders menunjukkan peningkatan, meski beberapa OPD kurang aktif. Prevalensi *stunting* di Pati turun dari 20,7% menjadi 18,3%, namun partisipasi masyarakat dan monitoring masih menjadi kendala. Faktor budaya dan institusi menghambat kolaborasi, sementara faktor politik tidak berpengaruh. Perlu koordinasi antar OPD, komunikasi transparan, dan dukungan dari tokoh masyarakat. Rencana kerja bersama, evaluasi berkala, pelatihan, serta monitoring terstruktur dapat meningkatkan kolaborasi dan efektivitas program.

Kata kunci: *Stunting*, Kolaborasi, OPD

COLLABORATIVE GOVERNANCE IN EFFORTS TO REDUCE STUNTING PREVALENCE IN METARAMAN VILLAGE MARGOREJO SUBDISTRICT PATI REGENCY

Silvy Annada Wahyudhi, Herbasuki Nurcahyanto
Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. dr. Antonius Suroyo, Tembalang, Kota Semarang Kode Pos 50275
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman: <https://fisip.undip.ac.id> E-mail: fisip@undip.ac.id

Abstract

A qualitative approach was conducted to analyze the collaborative process in addressing the prevalence of stunting in Metaraman Village, Margorejo Sub-district, Pati Regency. The research applies Ansell and Gash's Collaborative Governance theory and employs triangulation techniques to ensure data quality. Findings reveal that despite regular coordination meetings and the use of digital platforms, several Regional Apparatus Organizations (OPDs) have not performed optimally. Trust is developed through meetings; however, leadership commitment remains weak, community support is low, and non-OPD stakeholders have expressed concerns about the lack of follow-up on funding. The implementation of eight convergence actions by Bappeda Pati begins with situational analysis, planning, stunting deliberations, and the issuance of a Regent Regulation as the legal framework. Coordination among stakeholders shows improvement, although some OPDs remain inactive. The stunting prevalence in Pati decreased from 20.7% to 18.3%, yet community participation and monitoring remain significant challenges. Cultural and institutional factors hinder collaboration, while political factors show no notable influence. Strengthening inter-OPD coordination, ensuring transparent communication, and gaining support from community leaders are essential. Joint work plans, periodic evaluations, training, and structured monitoring are recommended to improve collaboration and program effectiveness.

Keywords: Stunting, Collaboration, OPD

PENDAHULUAN

Berdasarkan laporan Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, ada empat masalah gizi yang mempengaruhi anak balita di Indonesia, yaitu *stunting*, *overweight*, *underweight*, juga *wasting*. *Stunting* yang ditandai dengan tubuh pendek, menjadi salah satu isu gizi yang menjadi atensi serius oleh pihak pemerintah beserta khalayak umum. Kaitannya dengan itu, dikarenakan oleh tingginya prevalensi *stunting*

nasional, yang diperkirakan mencapai 21,6% di periode 2022. Angka tersebut lebih tinggi dari standar WHO atau *World Health Organization* yang menetapkan batas dengan persentase 20%. Situasi inilah menegaskan bahwa, *stunting* masih menjadi masalah *urgent* di Indonesia yang membutuhkan upaya-upaya besar untuk penanganannya.

Stunting bisa mengakibatkan kematian pada bayi dan anak, serta meningkatkan risiko penyakit dan mengurangi kemampuan kognitif

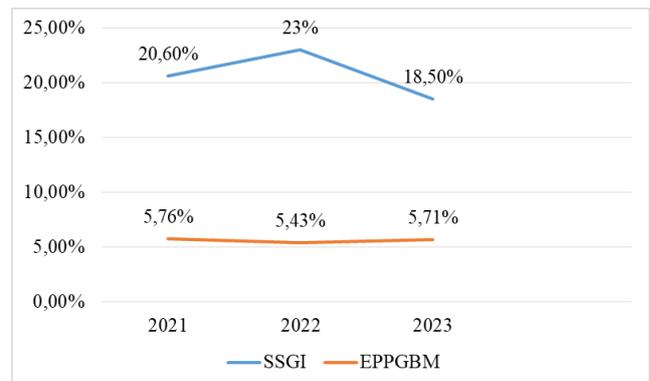
mereka. *Stunting* juga memiliki dampak yang signifikan pada perkembangan otak anak, sehingga secara tidak langsung masalah *stunting* menjadi isu mendasar dalam upaya mengembangkan sumber daya manusia karena dapat mempengaruhi daya saing individu. Selain itu, Kepala Bappenas menganggap *stunting* sebagai ancaman serius bagi perekonomian nasional dan bonus demografi 2030 (Bappenas, 2018). *Stunting* adalah masalah yang rumit dan memerlukan intervensi melalui pendekatan lintas sektor, termasuk intervensi dalam bidang sosial, ekonomi, ketahanan pangan, dan sebagainya.

Dengan adanya Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 mengenai Penurunan *Stunting*, pihak berwenang secara resmi menetapkan *stunting* sebagai salah satu program prioritas nasional. Selanjutnya, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merilis peraturan No. 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* (RANPASTI) Indonesia Tahun 2021-2024. RANPASTI merencanakan langkah-langkah yang akan diambil oleh berbagai tingkatan pemerintah, termasuk pusat, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan, serta melibatkan berbagai pihak dalam upaya penanganan masalah *stunting*.

Upaya menekan dan mempercepat penurunan angka *stunting* di Kabupaten Pati, Bupati Pati Haryanto periode 2017-2022 berdasarkan SK Bupati Nomor 045.2/5297 Tahun 2022, membentuk dan mengukuhkan

Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) pada Juni 2022 yang terdiri dari Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Kepala OPD, Camat, Organisasi Profesi, TP-PKK, ormas kerohanian, beserta akademisi. Permasalahan *stunting* di Kabupaten Pati masih menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Pati. Pasalnya, kasus *stunting* di Pati masih ribuan hingga Juni 2023. Pada November 2023, Pj Gubernur Jawa Tengah (dalam Arif Febriyanto, 2023) menyatakan Kabupaten Pati menempati peringkat ke-15 jumlah perkara *stunting* tertinggi di Jawa Tengah. Sejak tahun 2020, angka *stunting* di Pati mengalami peningkatan.

Gambar 1.1 Prevalensi Stunting Kabupaten Pati



Sumber: Bapperida Kabupaten Pati, 2023.

Kabupaten Pati memiliki 21 kecamatan dan 401 desa serta 5 kelurahan. Dari 21 kecamatan yang terdapat di Kabupaten Pati terdapat 9 kecamatan yang angka prevalensi *stunting* diatas rata-rata Kabupaten yaitu Kecamatan Dukuhseti, Tayu, Jakenan, Margorejo, Wedarijaksa, Trangkil, Margoyoso, Gabus, dan Gunungwungkal. Kecamatan Margorejo menjadi kecamatan yang memiliki

prevalensi angka *stunting* tertinggi di tahun 2023 yang mencapai 14,1%. Dilihat dari tahun 2021-2023, prevalensi angka *stunting* di Kecamatan Margorejo mengalami kenaikan yang cukup signifikan mencapai 0,8%. Hal ini menandakan adanya masalah serius dalam kesehatan dan gizi anak-anak di Kecamatan Margorejo.

Berdasarkan data dari Puskesmas Margorejo dapat dilihat bahwa prevalensi angka *stunting* tertinggi pada tahun 2023 yaitu terletak di Desa Metaraman yaitu sebesar 18,97% dan desa Metaraman menjadi desa lokus *stunting* tahun 2023 di Kabupaten Pati. Proses kolaborasi berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menekan angka *stunting* telah dilakukan dengan berbagai upaya dan program. Namun, masih ditemukan beberapa permasalahan, yaitu koordinasi antar OPD yang terkadang belum berjalan dengan baik, terkendala oleh kesibukan masing-masing OPD, serta peran beberapa OPD yang masih belum terlihat secara aktif. Dalam proses komunikasi, masih terjadi miskomunikasi antar OPD. Program “Basuh Stupa” yang dikemukakan oleh BAPPERIDA dengan pemberian PMT untuk balita *stunting* belum sepenuhnya efektif karena perbedaan dalam petunjuk teknis (juknis) yang diterapkan. Secara umum, penanganan *stunting* belum optimal karena dari pihak pusat masih mencari terobosan atau strategi baru yang diharapkan memiliki daya ungkit. Proses kolaborasi yang ada di Kabupaten Pati belum mampu menekan

angka *stunting* sesuai target menjadi 14% (Dinas Kesehatan, 2024).

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, peneliti ingin meneliti permasalahan tersebut dengan judul “*Collaborative Governance* dalam Upaya Penanggulangan Prevalensi Angka *Stunting* di Desa Metaraman, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati”.

RUMUSAN MASALAH

Sesuai atas uraian latar belakang masalah sebelumnya, dirumuskan masalah pada penelitian, meliputi:

1. Bagaimana proses kolaboratif antar lembaga dalam upaya penanggulangan prevalensi angka *stunting* pada balita di Desa Metaraman, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati?
2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat proses kolaboratif dalam upaya penanggulangan prevalensi angka *stunting* pada balita di Desa Metaraman, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati?

KAJIAN TEORI

Administrasi Publik

Definisi administrasi publik oleh Chandler dan Plano (dalam Yeremias T. Keban, 2019) menggambarkan administrasi publik sebagai proses di mana sumber daya dan personel sektor publik diorganisir dan disesuaikan untuk merancang, melaksanakan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam

konteks kebijakan pemerintah. Dalam kajian literatur oleh McCurdy (dalam Yeremias T. Keban, 2019), administrasi publik juga bisa diinterpretasikan sebagai suatu proses politik yang berfungsi sebagai salah satu alat untuk mengatur sebuah negara, dan dapat dianggap sebagai pendekatan utama untuk menjalankan berbagai fungsi negara. Administrasi publik adalah usaha bersama oleh sekelompok individu atau organisasi untuk menjalankan aktivitas pemerintahan dengan tujuan mencapai efektivitas dan efisiensi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Manajemen Publik

Manajemen publik adalah salah satu bidang ilmu yang berasal dari ranah administrasi publik. Bidang ini membahas berbagai aspek, termasuk restrukturisasi organisasi, perencanaan anggaran, pengelolaan sumber daya, dan penilaian program. Pemahaman tentang manajemen publik sangatlah tergantung kepada keadaan beserta lingkungan kontekstual, yang harus dipertimbangkan untuk menjalankannya secara efektif. Pada dasarnya, manajemen publik, yang juga dikenal sebagai manajemen pemerintah, merupakan upaya dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menggunakan infrastruktur dan sumber daya yang tersedia. Elemen-elemen manajemen saat ini memiliki signifikansi yang besar dalam menjalankan fungsi organisasi, pada bidang swasta atau sektor publik seperti pemerintahan.

Perlu ditekankan bahwa, meskipun prinsip-prinsip manajemen yang digunakan dalam sektor publik bisa dipengaruhi oleh prinsip-prinsip manajemen sektor swasta, hal ini tidak mengubah sifat dan tujuan organisasi sektor publik agar serupa dengan sektor swasta (Wijaya, A. F., & Danar, O. R. 2014).

Collaborative Governance

Menurut Ansell dan Gash (dalam Sunu, 2020) teori *Collaborative Governance* adalah proses pengambilan keputusan yang melibatkan pemerintah, berbagai entitas publik, organisasi non-pemerintah, juga masyarakat, baik secara maupun tidak dengan tujuan mengatasi masalah-masalah masyarakat.

1. Kondisi awal
2. Desain kelembagaan
3. Kepemimpinan
4. Proses kolaboratif

Proses kolaboratif adalah elemen kunci dalam model *Collaborative Governance*. Proses ini berfokus pada pengembangan saling percaya dan komitmen antar pihak yang bersangkutan pada perencanaan kolaboratif. Melalui kolaborasi, tercipta visi dan misi yang lugas, beserta pemahaman bersama guna melaksanakan tahap perencanaan kolaboratif terkait. Menurut teori ini, proses kolaboratif terdiri dari :

- a. Dialog tatap muka (*face to face dialogue*)

Dialog antara pemangku kepentingan dijalankan guna mengidentifikasi

kesempatan yang memfokuskan narasi bahwasanya kolaborasi mampu menghasilkan situasi “saling memberi untung” bagi semua pihak yang terlibat.

- b. Membangun kepercayaan (*trust building*)
Para pemimpin kolaborasi perlu memiliki kemampuan untuk membangun kepercayaan antar pihak pemangku kepentingan. Tahap ini memerlukan waktu yang lama dan membutuhkan komitmen yang kuat.
- c. Komitmen dalam proses kolaborasi (*commitment to process*)
Keadaan saling bergantung yang tinggi antar pihak pemangku kepentingan cenderung memberi peningkatan atas komitmennya dalam kolaborasi. Penting untuk diingat bahwa kolaborasi bukanlah kesepakatan sekali saja, melainkan proses kerja sama secara berkelanjutan sekaligus saling memberi untung.
- d. Pemahaman bersama (*share understanding*)
Di suatu titik, pihak-pihak pemangku kepentingan perlu mengembangkan pemahaman bersama terkait hal-hal yang ingin diwujudkan. Pemahaman tersebut mencakup tujuan bersama secara lugas, pendefinisian masalah yang alami secara kolektif, serta nilai-nilai yang hendak diwujudkan melalui kolaborasi.
- e. Hasil antara (*intermediate outcomes*)
Kolaborasi lebih mungkin berlanjut saat hasil dari manfaat beserta tujuan

berkolaborasi mampu dirasa secara nyata, meskipun masih kecil, sebagaimana hasil sementara di tahap tersebut. Hasil kecil (*small win*) mampu dijadikan pendukung pada usaha membangun komitmen sekaligus kepercayaan bersama di antara pihak pemangku kepentingan.

Menurut *Government of Canada* tahun 2008 (dalam Sudarmo, 2011) terhambatnya kemajuan kolaborasi (serta partisipasi) dikarenakan sejumlah faktor, utamanya budaya, institusi, beserta politik:

1. Faktor budaya
Terhadap aspek budaya, kolaborasi dapat mengalami kegagalan sebab terdapatnya kecenderungan budaya yang menekankan ketergantungan kepada pedoman, takut mengambil inovasi maupun risiko.
2. Faktor institusi
Kolaborasi bisa mengalami kegagalan karena lembaga-lembaga bersangkutan, utamanya pihak pemerintah, sering kali relatif mengimplementasi struktur hirarkis pada lembaga-lembaga lain yang turut berpartisipasi dalam kolaborasi tersebut.
3. Faktor politik
Kegagalan dalam kolaborasi dapat disebabkan oleh minimnya inovasi dari pemimpin guna meraih tujuan politik yang bersifat kompleks dan seringkali saling bertentangan.

Stunting

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). *Stunting* mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otak. *Stunting* adalah bentuk paling umum dari anak-anak gizi buruk di dunia, dan dialami oleh 161 juta anak berusia 0-5 tahun. *Stunting* telah terbukti berhubungan dengan peningkatan morbiditas dan mortalitas anak, penurunan fungsi kognitif, dan peningkatan risiko penyakit kronis di masa dewasa.

Penurunan *stunting* menitikberatkan pada penanganan penyebab masalah gizi, yaitu faktor yang berhubungan dengan ketahanan pangan khususnya akses terhadap pangan bergizi (makanan), lingkungan sosial yang terkait dengan praktik pemberian makanan bayi dan anak (pengasuhan), akses terhadap pelayanan kesehatan untuk pencegahan dan pengobatan (kesehatan), serta kesehatan lingkungan yang meliputi tersedianya sarana air bersih dan sanitasi (lingkungan). Keempat faktor tersebut mempengaruhi asupan gizi dan status kesehatan ibu dan anak. Intervensi terhadap keempat faktor tersebut diharapkan dapat mencegah masalah gizi, baik kekurangan maupun kelebihan gizi (Bappenas, 2018).

Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi *stunting* melalui pendekatan multisektor yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*.

METODE

Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, studi literatur. Penelitian ini menggunakan teori *collaborative governance* dari Ansell dan Gash. Situs penelitian ini yaitu Desa Metaraman, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati. Teknik pengumpulan data yaitu teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini akan memaparkan hasil penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan *Collaborative Governance* dalam penanggulangan prevalensi angka *stunting* di Desa Metaraman Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati. Penelitian ini telah dilaksanakan melalui wawancara, observasi, dan studi literatur. Tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses *Collaborative Governance* dalam penanggulangan prevalensi angka *stunting* di Desa Metaraman Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati yang telah dilakukan oleh BAPPERIDA, Dinas Kesehatan Kabupaten Pati dengan pemangku kepentingan yang terlibat lainnya.

Proses Collaborative Governance

Dialog Tatap Muka (*Face to Face Dialogue*)

Dialog tatap muka dalam penanganan prevalensi angka *stunting* ini dimulai dengan pembentukan TPPS yang terdiri dari OPD,

LSM, dan non OPD dengan melakukan rembug *stunting*. Melalui rapat koordinasi rutin, dialog tatap muka serta penggunaan platform digital, para pemangku kepentingan dapat berbagi data dan informasi terkini tentang perkembangan intervensi yang telah dilakukan, tantangan yang dihadapi, serta upaya untuk mengatasinya. Pihak swasta juga ikut terlibat dalam penanggulangan prevalensi angka *stunting* melalui program BAAS dari mulai PT BPR Bank Daerah Pati, baznas, hotel, dan restoran. Meskipun upaya kolaborasi ini telah berjalan, ditemukan bahwa beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum sepenuhnya menunjukkan peran dan kontribusi mereka secara optimal. Missskomunikasi yang terjadi juga menghambat kelancaran koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dalam menangani masalah *stunting*.

Membangun Kepercayaan (*Trust Building*)

Membangun kepercayaan dalam proses kolaborasi dilakukan dengan diadakannya rapat secara berkala. Namun, komitmen pimpinan dalam hal ini kurang, yang dimana seharusnya Sekretaris Daerah yang menjadi ketua TPPS, namun Bapperida Kabupaten Pati yang ditunjuk menjadi ketua dan semua sektor ditangani oleh Bapperida. Di tingkat desa, membangun kepercayaan dengan masyarakat dalam pelaksanaan program pemerintah sering kali menjadi tantangan tersendiri, terutama ketika masyarakat menunjukkan ketidaktertarikan atau kurangnya dukungan terhadap program yang

telah dicanangkan. Pihak non OPD yang telah memberikan bantuan dana menyampaikan bahwa tidak ada tindak lanjut berupa laporan atau penjelasan rinci mengenai alokasi dana tersebut.

Komitmen pada Proses (*Commitment to Process*)

Komitmen pada proses ini dimulai dengan pelaksanaan 8 aksi konvergensi yang dipelopori oleh Bapperida Kabupaten Pati.

Tabel 1.1 8 Aksi Konvergensi

Kegiatan	PIC
Aksi 1 : Analisis Situasi	Bapperida
Aksi 2 : Rencana Kegiatan	Bapperida
Aksi 3 : Rembug Stunting	Sekda & Bapperida
Aksi 4 : Perbup/Perwali	Lintas OPD
Aksi 5 : Pembinaan Pemdes/Kelurahan dan Masyarakat	Lintas OPD
Aksi 6 : Manajemen Data	Bapperida
Aksi 7 : Pengukuran dan Publikasi	Dinas Kesehatan & Dinas KB
Aksi 8 : Reviu Tahunan	Sekda & Bapperida

Sumber : Bapperida Kabupaten Pati, 2024

Dimulai dari analisis situasi untuk memahami kondisi *stunting* di wilayah tersebut, yang kemudian diikuti oleh perencanaan kegiatan strategis. Setelahnya diadakan rembug *stunting* dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk menyusun langkah bersama yang komprehensif. Tak hanya itu, komitmen

ini juga dibuktikan dengan penerbitan Peraturan Bupati terkait yaitu:

1. Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2020 (belum mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021) tentang percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Pati
2. Peraturan Bupati Pati Nomor 38 Tahun 2020 tentang kewenangan desa dalam upaya pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi di tingkat desa
3. SURAT EDARAN Nomor 444/4179.1 Tahun 2022 tentang dukungan program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS) dalam rangka percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Pati
4. SK Bupati Nomor 045.2/5297 Tahun 2022 tentang pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) di Kabupaten Pati
5. SK Bupati Nomor 050/5090 Tahun 2022 tentang penetapan desa lokasi fokus intervensi penurunan *stunting* terintegrasi di Kabupaten Pati Tahun 2023

Peraturan tersebut menjadi landasan hukum dalam menjalankan aksi-aksi konvergensi. Pembinaan kepada pemerintah desa dan kelurahan serta sosialisasi kepada masyarakat dilakukan sebagai langkah untuk memastikan pemahaman yang merata di semua tingkat, diikuti dengan manajemen data akurat, pengukuran hasil, publikasi yang transparan, dan review tahunan yang komprehensif guna mengevaluasi pencapaian serta menyusun

rencana lanjutan. Tahapan demi tahapan ini dilaksanakan dengan cermat melalui koordinasi yang baik antara seluruh stakeholder, sehingga hasil yang diperoleh pun menunjukkan peningkatan. Setiap ada pertemuan rutin untuk membahas terkait *stunting*, semua stakeholder berusaha untuk selalu hadir yang menunjukkan bahwa mereka berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan *stunting* di Kabupaten Pati. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat beberapa OPD yang belum berperan secara aktif.

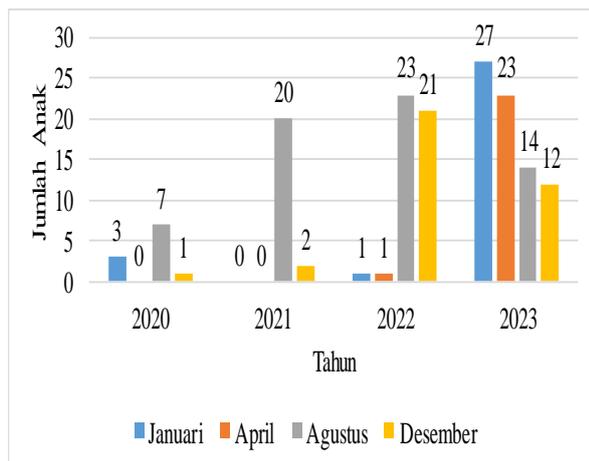
Pemahaman Bersama

Pemahaman bersama dalam penanganan *stunting* di Kabupaten Pati diupayakan melalui pertemuan-pertemuan rutin yang diadakan secara berkala. Pertemuan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan pemahaman antar pemangku kepentingan, sehingga penanganan *stunting* dapat dilakukan dengan lebih terarah dan terintegrasi. Namun, dari hasil wawancara ini juga diketahui bahwa masih terdapat beberapa OPD yang pemahamannya terkait penanganan *stunting* belum optimal. Bapperida Kabupaten Pati menyebutkan bahwa kendala ini sering muncul karena perbedaan fokus kerja dan prioritas masing-masing OPD, sehingga pemahaman yang dihasilkan belum seragam.

Hasil Antara

Hasil antara dalam *collaborative governance* dalam upaya menurunkan prevalensi angka *stunting* menunjukkan beberapa pencapaian signifikan, meskipun masih ada tantangan yang perlu diatasi. Di Kabupaten Pati, prevalensi *stunting* telah turun dari 20,7% menjadi 18,3%. Pemerintah Kabupaten Pati berhasil meraih peringkat kedua dalam penilaian kinerja pelaksanaan 8 aksi konvergensi, sebuah pencapaian yang mengakui efektivitas kolaborasi antar pihak dalam program penanggulangan *stunting*. Di tingkat desa, hasil yang lebih rinci dapat dilihat di Desa Metaraman, di mana jumlah anak yang terindikasi *stunting* mengalami penurunan pada akhir tahun 2023.

Gambar 1.2 Rekap Jumlah Anak Stunting di Desa Metaraman



Sumber: Kader Pembangunan Manusia Desa Metaraman, 2024.

Namun, beberapa kendala masih dihadapi dalam proses ini yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung program-

program *stunting* di Desa Metaraman masih kurang kooperatif, yang memperlambat keberhasilan program secara menyeluruh. Di sisi lain, monitoring yang dilakukan oleh Puskesmas Margorejo dinilai masih belum optimal.

Faktor Penghambat dalam Upaya Penanggulangan Prevalensi Angka *Stunting* di Desa Metaraman Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati

Faktor Budaya

Faktor budaya menjadi penghambat dalam proses kolaborasi untuk menangani *stunting* di Desa Metaraman, terutama dari sisi masyarakat. Budaya dan kebiasaan lama yang telah melekat selama bertahun-tahun dalam kehidupan sehari-hari masyarakat masih memengaruhi cara mereka menyikapi program kesehatan yang diberikan oleh pemerintah atau tenaga kesehatan. Masyarakat masih sangat bergantung pada saran dari orang-orang tua atau anggota keluarga yang lebih senior, seperti nenek atau kakek, yang mungkin tidak memiliki pemahaman mendalam mengenai gizi seimbang. Kurangnya kepercayaan terhadap tenaga kesehatan juga memperparah ketidakkooperatifan masyarakat.

Faktor Institusi

Faktor institusi menjadi penghambat dalam proses kolaborasi dikarenakan penerapan

struktur hierarkis dan pendekatan yang terlalu kaku terhadap tugas pokok dan fungsi (tupoksi) di antara para pemangku kepentingan. Selain itu, pemangku kepentingan yang terlibat, termasuk dinas kesehatan, puskesmas, pemerintah desa, dan lembaga lainnya, cenderung berpegang teguh pada tupoksi mereka masing-masing dan mengikuti SOP yang telah ditetapkan tanpa banyak ruang untuk penyesuaian.

Faktor Politik

Faktor politik dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Pati telah melakukan berbagai inovasi untuk menanggulangi permasalahan *stunting* dengan melibatkan berbagai instansi yang masing-masing berperan penting dalam mendukung upaya ini. Salah satu program inovatif yang dikembangkan Bapperida Kabupaten Pati adalah program BASUH STUPA atau singkatan dari "Bantu Anak Sehat Untuk Pati." Program ini berfokus pada pemberian intervensi langsung kepada anak-anak yang berisiko *stunting* di berbagai desa. Selain itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Pati memiliki program inovatif lain yang dikenal dengan nama BERDENTING, atau "Berantas Stunting Tingkat Kabupaten." Program ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan layanan kesehatan yang komprehensif, termasuk pemeriksaan rutin bagi anak-anak dan ibu hamil.

PENUTUP

Simpulan

Upaya collaborative governance dalam penanganan *stunting* di Kabupaten Pati mencakup dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan hasil yang dicapai. Dialog tatap muka dilakukan melalui pembentukan TPPS yang melibatkan berbagai pihak, termasuk OPD, LSM, dan sektor swasta, dengan dukungan program BAAS. Namun, miskomunikasi antar-OPD sering menjadi penghambat dalam koordinasi lintas sektor. Membangun kepercayaan dilakukan melalui rapat berkala, meskipun komitmen pimpinan, terutama dari tingkat kabupaten hingga desa, masih kurang optimal. Komitmen pada proses diwujudkan dengan pelaksanaan delapan aksi konvergensi yang dipimpin Bapperida dan ditopang oleh regulasi berupa Peraturan Bupati (Perbup). Hasilnya, prevalensi *stunting* di Kabupaten Pati berhasil turun dari 20,7% menjadi 18,3%. Namun, rendahnya partisipasi masyarakat dan monitoring yang belum optimal menjadi kendala dalam mendukung keberhasilan program secara menyeluruh.

Proses kolaborasi dalam penanganan *stunting* di Desa Metaraman menghadapi beberapa hambatan yang melibatkan faktor budaya, institusi, dan politik. Faktor budaya menjadi tantangan karena masyarakat masih dipengaruhi oleh kebiasaan lama dan saran dari anggota keluarga yang kurang memahami pentingnya gizi seimbang, serta rendahnya tingkat kepercayaan terhadap tenaga kesehatan.

Di sisi institusi, struktur hierarkis dan pendekatan yang terlalu kaku terhadap tugas pokok dan fungsi (tupoksi) menghambat fleksibilitas kolaborasi di antara para pemangku kepentingan. Namun, dari sisi politik tidak menjadi penghambat dalam proses kolaborasi dikarenakan Pemerintah Kabupaten Pati telah menginisiasi berbagai program inovatif seperti BASUH STUPA dan BERDENTING untuk memberikan intervensi langsung, edukasi, dan layanan kesehatan yang lebih komprehensif bagi anak-anak dan ibu hamil di berbagai desa. Upaya ini menunjukkan komitmen untuk mengatasi tantangan dan meningkatkan efektivitas kolaborasi dalam menanggulangi *stunting*.

Saran

1. Penanganan *stunting* membutuhkan koordinasi rutin lintas OPD dengan pembagian tugas yang jelas, dialog terbuka antara Bapperida dan Sekretaris Daerah, serta penerapan sistem komunikasi dan pelaporan berbasis digital untuk transparansi. Peningkatan partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui pendekatan kepada tokoh masyarakat, FGD, dan edukasi langsung, sementara monitoring program disarankan berbasis data menggunakan aplikasi kesehatan. Pelatihan praktis tentang penanganan *stunting* dan evaluasi berkala juga penting untuk memastikan efektivitas program.

2. Penanganan *stunting* di Desa Metaraman memerlukan kunjungan rutin tenaga kesehatan sebanyak empat kali dalam sebulan untuk memberikan pendampingan langsung kepada keluarga. Selain itu, pelatihan yang berfokus pada peningkatan kemampuan kerja sama dan manajemen lintas fungsi perlu dilakukan untuk membantu pemangku kepentingan memahami peran masing-masing instansi dalam mencapai tujuan bersama. SOP yang ada juga perlu ditinjau ulang agar lebih fleksibel, terutama dalam tugas-tugas yang membutuhkan penyesuaian dengan kondisi di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Administrative Science Quarterly. (1956). Administrative Science Quarterly. Ithaca, NY: Cornell University.
- Adriani, Prasanti dan kawan-kawan. (2022). Stunting Pada Anak. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Annur, C. M. (2023). Selain Stunting, Ini Deretan Masalah Gizi yang Kerap Dialami Balita di Indonesia. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/03/selain-stunting-ini-deretan-masalah-gizi-yang-kerap-dialami-balita-di-indonesia#:~:text=Hasil%20Survei%20Satus%20Gizi%20Indonesia%20%28SSGI%29%20Kementerian%20Kesehatan,Di%20antaranya%20yakni%20stunting%2C%20wasting%2C%20underweight%2C%20dan%20overweight>. Diakses pada 22 Mei 2024.
- Arasti, F. (2021). DEFINISI COLLABORATIVE GOVERNANCE. Dictio.Id. <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-collaborative-governance/160412>.

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2018). Menteri Bambang: Stunting Hambat Pemanfaatan Bonus Demografi Indonesia. <https://www.bappenas.go.id/berita/menteri-bambang-stunting-hambat-pemanfaatan-bonus-demografi-indonesia>. Diakses pada 6 Juni 2024.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2018). Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten/Kota Jakarta: Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33-54.
- Febriyanto, A. (2023). Stunting di Pati Tahun 2023 Meningkat, Urutan ke-15 Tertinggi se-Jateng. <https://lingkarjateng.id/berita-pati-hari-ini/stunting-di-pati-tahun-2023-meningkat-urutan-ke-15-tertinggi-se-jateng/>. Diakses pada 1 Juni 2024.
- Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiyati, S., Honesti, L., Wahyuni, S., Mouw, E., ... & Waris, L. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Get Press.
- Goodnow, Frank J. (1990). *Politics and Administration*. New York: Macmillan.
- Henry, Nicholas. 2004. *Public Administration & Public Affairs*. Nith Edition USA : Pearson Education. Inc.
- Herlianti, L. (2022). Collaboration of Actors in the Network in Stunting Prevention Programs in Bulukumba District. *Enrichment: Journal of Management*, 12(2), 2021-2026.
- Keban, Yermias T. 2014. *Enam Dimensi Startegis Administrasi Publik*. Yogyakarta: Penerbit Gaya Media.
- Kementerian Kesehatan. (2023). Prevalensi Stunting di Indonesia Turun ke 21,6% dari 24,4%. <https://www.kemkes.go.id/id/rilis-kesehatan/prevalensi-stunting-di-indonesia-turun-ke-216-dari-244>. Diakses pada 5 Mei 2024.
- Pemerintah Kabupaten Pati. (2023). *Pemkab Pati Terus Upayakan Penurunan Angka Stunting*. <https://www.patikab.go.id/v2/id/2023/04/04/pemkab-pati-terus-upayakan-penurunan-angka-stuntin/>. Diakses pada 1 Juni 2024.
- Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024.
- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
- Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023.
- Sudarmo. (2011). *Isu-isu administrasi publik dalam perspektif governance*. Smart media.
- Sudarmo, S. (2015). *Administrasi Publik Kontemporer*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunu, Retno., Warsono, Hardi., & Rachim, Abd. (2020). *Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- White, Leonard D. (1926). *Introduction to the Study of Public Administration*. New York: Macmillan.
- Wijaya, A. F., & Danar, O. R. (2014). *Manajemen Publik: Teori dan Praktik*. Universitas Brawijaya Press.
- Yunifar, A. T., Kusbandrijo, B., & Puspaningtyas, A. (2023). *COLLABORATIVE GOVERNANCE PADA PENERAPAN PERWALI NO 79 TAHUN 2022 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KOTA SURABAYA*. PRAJA observer: *Jurnal Penelitian Administrasi Publik* (e-ISSN: 2797-0469), 3(04), 254-26.